

OMBUDSMAN KALBAR DORONG PERBAIKAN STANDAR LAYANAN DPPP PONTIANAK LEWAT FORUM KONSULTASI PUBLIK

Rabu, 11 Februari 2026 - kalbar

PONTIANAK - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Tariyah, memberikan sejumlah catatan perbaikan terkait Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DPPP) Kota Pontianak. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar dinas tersebut pada Selasa (10/2/2026).

Tariyah mengapresiasi langkah DPPP Kota Pontianak menyelenggarakan FKP sebagai upaya mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurutnya, forum ini sangat tepat untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan sebelum standar pelayanan disahkan dan dilaksanakan.

"Namun, masih ada beberapa catatan atau perbaikan yang harus dilakukan oleh DPPP Kota Pontianak dalam menyempurnakan Standar Pelayanan dan SOP atas sejumlah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh empat bidang dan dua UPT yang ada," ujar Tariyah.

Ia merinci bahwa perbaikan diperlukan pada aspek Service Delivery, yang meliputi persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, hingga kepastian biaya atau tarif yang harus memiliki dasar hukum. Selain itu, perbaikan juga menyoroti aspek Manufacturing, seperti kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jaminan keamanan, hingga evaluasi kinerja.

Sementara itu, Plt Kepala DPPP Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menjelaskan bahwa kegiatan bertema "Akselerasi Pelayanan Prima Di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak" ini digelar dalam rangka transformasi pelayanan publik.

"Kami ingin Standar Pelayanan semakin baik dan pelayanan publik lebih berkualitas di tahun 2026. Oleh karena itu, kami mengundang Ombudsman dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaku usaha," ungkap Yamin.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pontianak, para pelaku usaha, perwakilan petani, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, perwakilan SMK, PLN, Dharma Wanita Persatuan, PKK, serta insan media.